

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peneliti menarik beberapa kesimpulan berdasarkan dari hasil temuan yang dilakukan terhadap studi mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada periode 2019-2024, di antaranya:

1. Perkembangan publikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Publikasi pada lingkup topik secara general paling banyak pada tahun 2024 sebanyak 62 publikasi. Sementara itu, publikasi pada lingkup topik secara spesifik paling banyak pada tahun 2021 sebanyak 6 publikasi. Selain itu, hal yang menjadi perhatian dalam perkembangan publikasi pada topik ini adalah pada artikel publikasi yang banyak mendapatkan kutipan sebanyak 8 dikutip, yakni penelitian yang membahas terkait penggunaan lahan produktif yang kosong di Kelurahan Lakarsantri, Surabaya sebagai bagian dari pelaksanaan *urban farming* serta penelitian yang mengkaji pelaksanaan program pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, yakni dengan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Analisis tren literatur berdasarkan *keyword* pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan topik ini berkembang. Hal tersebut terlihat pada klusterisasi literatur yang menghasilkan pola tertentu berdasarkan analisis menggunakan

VOSviewer, yakni ditemukan 39 kata kunci yang telah ditentukan batasannya menjadi 37 kata kunci dari 15 artikel. Terdapat kata kunci “implementasi” dan “kebijakan” yang memiliki frekuensi kata kunci lebih besar berdasarkan ukuran nodenya menunjukkan bahwa kedua kata kunci itu berkaitan erat dengan fokus penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, terdeteksi 12 kata kunci saling berhubungan yang membentuk lima klaster kata kunci dengan penggambaran warna yang berbeda-beda.

3. Temuan literatur yang telah dianalisis menunjukkan berbagai macam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019-2024 sebagai era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua di berbagai daerah. Terdapat 12 kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, yakni Program Ketahanan Pangan Dana Desa, Program Urban Farming, Program Keluarga Harapan (PKH), Kebijakan Pembangunan Industri Rumah Tangga, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kebijakan Penurunan Stunting, Kebijakan Revolusi Pertanian, dan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dari berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, kebijakan penanggulangan kemiskinan jenis bantuan sosial lebih banyak dilaksanakan pada periode 2019-2024, yakni Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Hasil utama dari temuan ini berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis terhadap 15 artikel pada tahun 2019-2024 terdapat enam faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan (*critical success factors*) dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yakni 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya 3) Struktur Birokrasi, 4) Disposisi; 5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; 6) Standar dan Tujuan Kebijakan. Keenam faktor ini memiliki keterkaitan dengan variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Hal ini memperkuat bahwa temuan *critical success factors* dengan teori tersebut memiliki relevansi dalam menganalisis kebijakan publik dalam konteks penanggulangan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, temuan berdasarkan analisis visualisasi *author keyword* menggunakan *VOSviewer* menunjukkan bahwa kata kunci “pengawasan” dan “koordinasi” relevan dengan salah satu temuan *critical success factors*, yakni struktur birokrasi. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mencerminkan adanya perbaikan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yakni atas dukungan faktor koordinasi dan pengawasan. Pengawasan dan koordinasi sebagai bagian dari faktor struktur birokrasi dibuktikan dengan adanya perbaikan tata kelola kementerian/lembaga dengan membentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Tim

Koordinasi Penanggulangan (TPKP) setiap daerah. Dengan demikian, struktur birokrasi dapat diposisikan sebagai *main factor* dalam efektivitas keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019-2024.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah disampaikan dalam kesimpulan, bagian ini akan memberikan rekomendasi yang strategis dari sisi akademis. Rekomendasi ditujukan untuk memaksimalkan upaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia pada masa mendatang.

1. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari berbagai daerah di Indonesia perlu dikaji kembali oleh pengambil kebijakan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan penting untuk memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat, seperti bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akan diterapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan dapat berkelanjutan.
2. Kaitannya dengan struktur birokrasi sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan peran pemerintah pusat dan daerah yang terus memperkuat koordinasi. Pada dasarnya, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Perbaikan sistem tata kelola yang mampu mendukung koordinasi dengan pembagian kewenangan yang jelas

dan kualifikasi para pelaksana kebijakan sesuai dengan kapasitasnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan,

3. Selain itu, kaitannya dengan pengawasan sebagai variabel dalam struktur birokrasi. Diperlukan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis bukti. Hal tersebut berkaitan dengan pemutakhiran data secara *real time* lintas kementerian dan daerah serta indikator kinerja yang terukur. Evaluasi berbasis bukti dapat membantu dalam memperbaiki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sering ditemukan permasalahan tidak tepat sasaran sehingga mendorong transparansi dan mendorong dukungan masyarakat untuk percaya terhadap kinerja pemerintah. Data yang akurat membuka peluang evaluasi kebijakan yang lebih terarah dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.